

PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

*Kadek Dwi Mayana Putri*¹

*Ida Bagus Putu Purbadharmaja*²

^{1,2}*FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia*

ABSTRAK

Fenomena kesenjangan terjadi sebagai konsekuensi dari proses pembangunan ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar wilayah akibat proses perubahan struktur ekonomi dan perbedaan pembangunan fasilitas publik dapat menimbulkan kesenjangan yang dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi pada pada Provinsi Bali di sembilan kabupaten/kota. Data diperoleh dari sumber sekunder yaitu dari laporan/publikasi resmi yang diterbitkan instansi dan lembaga yang relevan. Analisis jalur digunakan dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga adalah positif dan signifikan. Pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi dan konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah secara langsung tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh tidak langsung antara perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga.

Kata kunci: *perubahan struktur ekonomi, pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, kesejahteraan masyarakat*

Klasifikasi JEL: *E21, H72, I38, L16*

ABSTRACT

The phenomenon of inequality happen as a consequence of the development process which make growth concentrated in certain area. Differences of growth between region is a results of structural change and difference of public services/facilities, that lead to gaps in the level of welfare between regions. This study intend to explain the impact of structural change and government expenditure on household consumption and welfare. The research take place in nine region/cities in Bali Province. The data acquired from secondary sources from official reports/publications published by relevant institutions. Path analysis is used and the results is, structural change and government expenditure have a positive and significant direct impact on household consumption. Structural change and households consumption directly has a positive and significant impact on welfare. Government expenditure directly doesn't have a positive effect on welfare. Structural change and government expenditure indirectly affect welfare through household consumption.

keyword: *structural change, government expenditure, households consumption, welfare*

Klasifikasi JEL: E21, H72, I38, L16

PENDAHULUAN

Persoalan yang timbul dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi wilayah yaitu fenomena kesenjangan antarwilayah dan pemerataan pembangunan. Intensitas pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda mengakibatkan ketimpangan ekonomi antardaerah yang menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa persoalan seperti perbedaan potensi masing-masing wilayah yang mengarah pada perbedaan struktur ekonomi dan perbedaan penyediaan fasilitas publik. Pembangunan ekonomi di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, salah satunya merupakan akibat dari berlakunya Otonomi Daerah. Sebelum era otonomi proses pembangunan tersentralisasi hanya pada wilayah tertentu saja yang menyebabkan kesenjangan meningkat, sehingga tuntutan otonomi muncul agar dapat mewujudkan pemerataan dan daerah dapat memaksimalkan potensi sumber dayanya masing-masing.

Sejak kebijakan otonomi telah dilaksanakan, sesuai dengan tujuan otonomi seharusnya kesenjangan antarwilayah dapat dipersempit namun, pada kenyataannya kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah masih terjadi. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kualitas hidup masyarakat yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2020). Berdasarkan publikasi oleh BPS, pada tahun 2019 Provinsi Bali memperoleh nilai IPM sebesar 75,38 dimana capaian tersebut merupakan peringkat IPM tertinggi ke lima dari 34 Provinsi di Indonesia. Meskipun tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia di tingkat Provinsi, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan di antar kabupaten/kota. Fenomena kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali menyiratkan adanya perhatian yang berbeda oleh pemerintah dalam pembangunan. Distribusi kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat tertentu sangat bergantung pada sokongan dan perilaku individu dan pengaturan sosial politik yang mengatur interaksi sosial. Faktor-faktor ini (sokongan, perilaku dan interaksi sosial) juga menentukan kerentanan dari distribusi (Skoufias et al., 2012)

Tabel 1: IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
Provinsi Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38

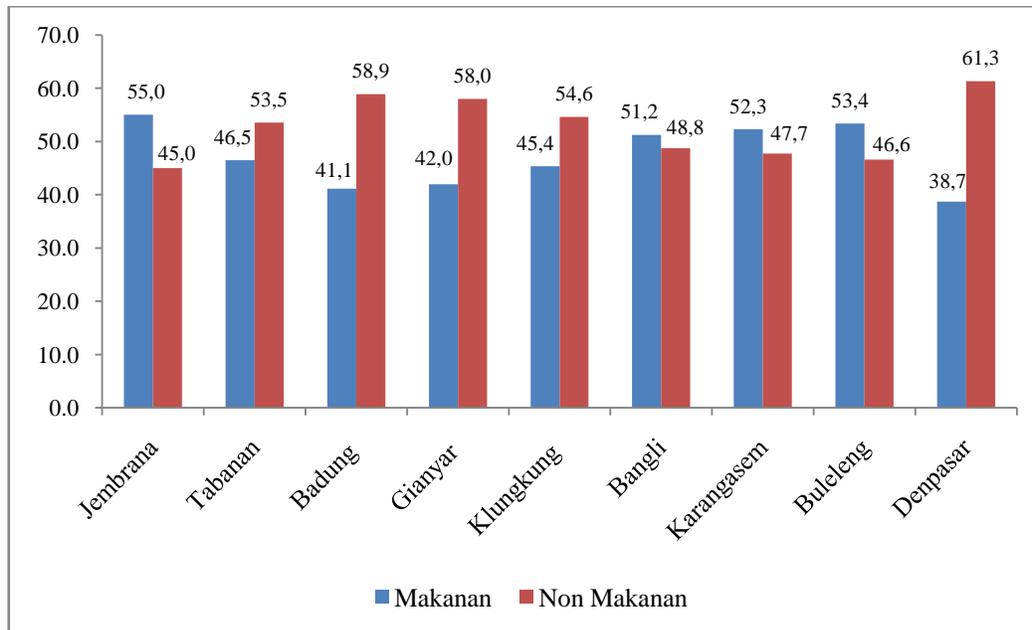
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Secara konvensional peningkatan tingkat konsumsi mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Kesejahteraan dari individu bisa dikatakan tinggi apabila sebagian besar kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan kolektif tinggi apabila kebutuhan dari seluruh populasi secara umum terpenuhi sebaliknya, baik kesejahteraan individu maupun kolektif akan rendah apabila sebagian besar kebutuhan tidak dapat terpenuhi (Jackson & Marks, 1999). Wilayah dengan penduduk yang tingkat kesejahtraannya rendah harus didorong dalam peningkatan pendapatan agar dapat meningkatkan konsumsi untuk meningkatkan kesejahtraannya melalui perubahan struktur ekonomi dari ekonomi yang memiliki nilai tambah rendah ke ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi serta dengan mendorong belanja publik.

Rumah tangga mengalihkan konsumsi dari yang semula lebih banyak untuk konsumsi makanan dan berubah untuk konsumsi non makanan. Kemudian bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan disposibel per kapita lebih tinggi daripada pengeluaran konsumsi makanan. Terdapat beberapa kelompok rumah tangga yang ditinjau dari pendapatan per kapita tergolong miskin namun bila ditinjau dari asupan kalori termasuk dalam kategori surplus kalori (Sutomo, 1989). Komposisi konsumsi penduduk dapat menjelaskan bagaimana kondisi kemakmuran masyarakat. Terjadinya peningkatan pendapatan akan menggeser pola konsumsi. Pola konsumsi yang lebih banyak dialokasikan untuk makanan ke konsumsi untuk non makanan. Hal ini terjadi karena rendahnya elastisitas permintaan makanan dimana, kelompok masyarakat dengan konsumsi makanan yang sudah mencapai batas jenuh, disetiap kenaikan pendapatan akan

dipakai untuk kebutuhan non makanan. Data juga menunjukkan hal serupa dimana, pada Provinsi Bali, Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi rata-rata tingkat konsumsi masyarakatnya juga tinggi terutama konsumsi non makanan.

Gambar 1. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga di Provinsi Bali 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020 (diolah)

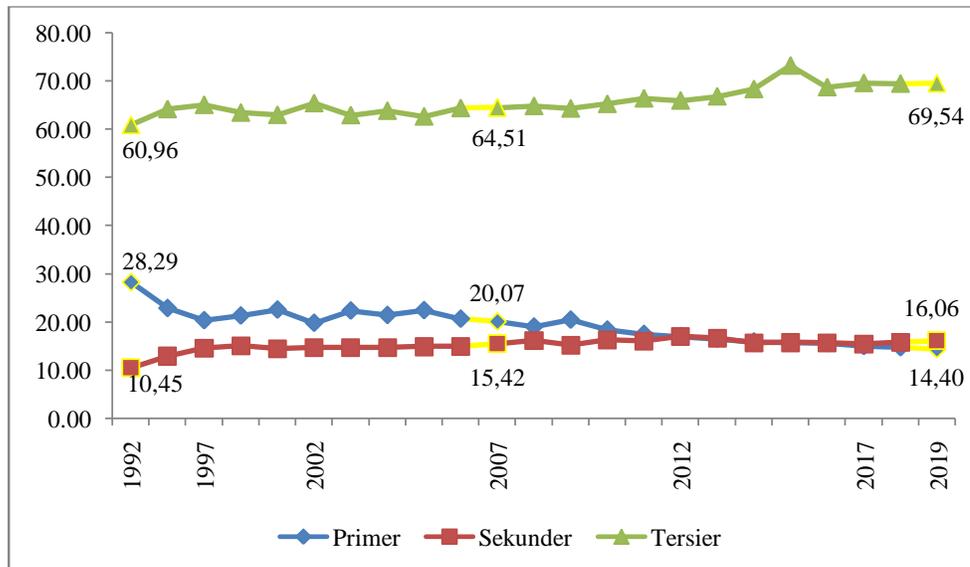
Pembangunan ekonomi mencakup perubahan dalam tata susunan ekonomi dimana terjadi transformasi atau perubahan struktur dalam perekonomian secara menyeluruh. Lewis menyatakan pergeseran tenaga kerja yang berasal pada pertanian subsisten ke industri modern meningkatkan produktivitas pekerja, produktivitas keseluruhan negara, dan *output* per kapita. Lewis juga menunjukan bahwa pola pertumbuhan ini akan mencapai titik balik ketika surplus tenaga kerja terserap habis. Kemudian sektor modern perlu menaikan upah untuk menarik tenaga kerja dari pertanian agar lebih menantang bagi perekonomian untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi sebelumnya. Secara teoritis, perubahan struktur ekonomi mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kaniovski, (2002); Dietrich, (2012); Ercolani & Wei (2014) dan Vu, (2017) menemukan bahwa perubahan struktur ekonomi mampu memberikan pengaruh

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan *output* dalam perekonomian yang menandakan semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat yang akan meningkatkan daya beli dan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Bukti empiris bahwa peningkatan pendapatan per kapita berpengaruh pada konsumsi rumah tangga yaitu temuan Hanum & Sarlia, (2019) yaitu saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita juga diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat di Provinsi Aceh. Peningkatan konsumsi merupakan tanda dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Hukom, (2015) mendapatkan bahwa perubahan struktur ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Disisi lain kesenjangan ekonomi wilayah yang merupakan dampak dari konsentrasi spasial akibat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan modal, tenaga kerja, dan perdagangan terkonsentrasi di wilayah perkotaan sebagai dampak dari perubahan struktural.

Perubahan struktural dapat dilihat sebagai pergeseran dalam hal akumulasi investasi atau pembentukan modal. Perubahan struktural merupakan ciri pokok pembangunan melalui proses akumulasi yaitu alokasi dan distribusi. Perubahan struktural merupakan hasil jalinan antara *supply effect* terhadap *demand effect* dalam kaitannya terhadap kenaikan pendapatan. Hal ini berdampak pada perbedaan pendapatan antardaerah dikarenakan memiliki keunggulan komparatif yang. Indikator yang dipergunakan untuk mengidentifikasi struktur perekonomian suatu wilayah yaitu distribusi sektoral PDRB. Provinsi Bali memiliki keunggulan komparatif pada industri pariwisata sehingga sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata yaitu sektor tersier mempunyai kontribusi paling dominan pada struktur ekonomi. Permintaan pada industri pariwisata mengakibatkan perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali.

Gambar 2: Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Pada PDRB Provinsi Bali



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020 (diolah)

Perubahan struktur ekonomi memunculkan tantangan dan peluang bagi masyarakat. Apabila dihubungkan antara hipotesis Kuznet dengan model pembangunan ekonomi Lewis maka sering kali proses lepas landas pertumbuhan dikaitkan dengan semakin besarnya peran industri dan jasa di daerah perkotaan yang menawarkan prospek yang lebih tinggi. Namun peralihan dari desa ke kota akan menimbulkan ketidakmerataan yang lebih besar. Ini memperlihatkan bahwa pada proses awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti peningkatan ketimpangan terutama jika hal itu melibatkan migrasi bertahap dari daerah pedesaan ke perkotaan yang dinamis. Penelitian Nyoman & Murjana Yasa, (2017) mendapatkan hasil pertumbuhan ekonomi akan mendorong migrasi penduduk. Namun setelah dekade pertumbuhan, sektor pedesaan berpenghasilan rendah menjadi minoritas, dan kemungkinan adaptasi teknologi yang lebih baik dalam pertanian akan meningkatkan upah, yang mengarah ke fase konvergensi di mana pertumbuhan dikaitkan dengan ketimpangan yang lebih rendah (Aizenman et al., 2012). Penemuan Cheong & Wu, (2014) mendapatkan hasil bahwa industrialisasi dan pembangunan industri tersier terbukti menguntungkan perkembangan ekonomi di Cina. Namun sayangnya ketidaksetaraan regional juga meningkat pesat dalam proses ini. Baymul & Sen, (2020) menemukan banyak negara

berpenghasilan rendah, di mana kemungkinan transformasi struktural yang realistis mungkin berupa perpindahan pekerja dari pertanian ke jasa yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dapat meningkat pada transformasi struktural lebih lanjut.

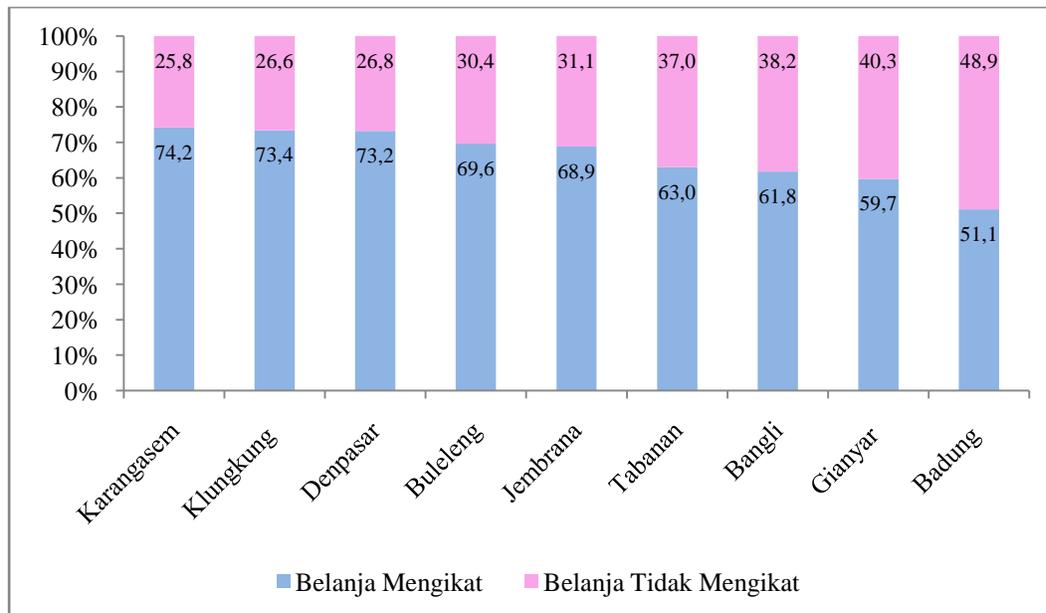
Suatu wilayah yang memiliki struktur ekonomi dengan produktivitas dan pengembalian yang meningkat bila menghasilkan komoditas bernilai tambah tinggi yang secara teknis canggih dan sebaliknya struktur ekonomi dengan keuntungan yang menurun dimana menghasilkan komoditas yang memiliki nilai tambah rendah dan sangat sederhana secara teknologi (Constantine, 2017). Jika dilihat dari nilai yang dihasilkan sektor tersier terlihat lebih menjajikan dari sektor primer. Namun sektor tersier sangat rentan terhadap perubahan situasi yang terjadi karena peristiwa bencana, keamanan dan lain sebagainya. Sementara sektor primer memiliki ketahanan yang lebih baik untuk stabilitas perekonomian maka dari itu selain memaksimalkan perkembangan sektor tersier pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan sektor primer. Perubahan struktur ekonomi menyebabkan berkurangnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB dan masifnya ekspansi pada sektor sekunder dan tersier akan berdampak langsung pada penggunaan lahan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sektoral lebih jauh sehingga akan berdampak pada stabilitas perekonomian daerah. Tingkat akumulasi modal manusia yang relatif tinggi di negara berkembang juga cenderung memberikan kontribusi untuk perubahan struktural karena negara berkembang meningkatkan intensitas keterampilan bauran produk mereka (Anderson & Pangestu, 1998).

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah apapun jenis belanjanya akan berdampak pada peningkatan *output*. Apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pengeluarannya maka permintaan barang dan jasa akan meningkat, perusahaan akan merespon dengan meningkatkan produksi sehingga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Zahari, (2017) peningkatan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Berdasarkan penelitian Aditia & Dewi, (2018) belanja pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali, begitu juga dengan temuan Fattah, (2012) dimana porsi belanja pemerintah untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan peningkatan pembangunan infrastruktur memberikan

pengaruh pada peningkatan IPM di Jeneponto meskipun upaya tersebut masih dapat dikatakan minimal. Peningkatan pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemakmuran. Penelitian Krisianto, (2018) menemukan elektrifikasi dapat memberikan dampak terhadap *households welfare*, dimana ditemukan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga setelah dijalankannya program elektrifikasi.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah terutama belanja untuk keperluan publik yang akan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Komposisi belanja daerah dapat mempengaruhi tingkat pembangunan suatu wilayah. Proporsi belanja mengikat yang lebih rendah menandakan ruang fiskal yang dimiliki daerah lebih besar. Bersarnya ruang fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan publik. Daerah dengan ruang fiskal yang relatif kecil harus mampu mengelola anggarannya secara efisien dan sebisa mungkin menggunakan anggaran untuk pelayanan publik, maka dari itu perencanaan dan penganggaran yang tertuang pada APBD memegang peran penting.

Gambar 3: Komposisi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali TA 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020 (diolah)

Kesenjangan ekonomi akibat perbedaan penerimaan daerah akan mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah yang menyebabkan perbedaan fasilitas/infrastruktur publik antarwilayah. Hal ini berdampak pada produktivitas masing-masing wilayah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal cenderung menyebabkan anggaran antarwilayah lebih beragam sehingga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antarwilayah karena PAD dan DBH dengan komponen yang beragam dan potensi pajak dan SDA yang juga beragam sehingga wilayah dengan potensi pajak dan SDA yang melimpah memperoleh penerimaan yang lebih tinggi.

Perbedaan penerimaan dalam anggaran akan berpengaruh pada perbedaan pengeluaran antarwilayah yang selanjutnya akan menyebabkan perbedaan hasil pembangunan (Rochana, 2014). Pada wilayah dengan pendapatan yang lebih tinggi kapasitas fiskal yang dimiliki juga akan tinggi, sehingga pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar dalam merancang kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa kendala anggaran. Namun, bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang kecil tetap harus mampu mengelola anggaran secara tepat dan efisien. Doumbia & Kinda, (2019) menemukan bahwa realokasi belanja pemerintah untuk perlindungan sosial dan infrastruktur mengarah pada pengurangan kesenjangan. Anderson et al., (2017) menemukan bahwa belanja pemerintah dapat memiliki dampak negatif terhadap kesenjangan namun tergantung pada jenis belanjanya. Dalam kasus belanja total pemerintah ditemukan memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan.

Dari paparan diatas tampak bahwa perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktur perekonomian dari ekonomi primer dengan produktivitas lebih rendah ke industri modern yang lebih produktif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat dari peningkatan pendapatan yang ditunjukkan langsung dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk keperluan konsumsi. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan daerah pusat pariwisata, dengan begitu perubahan struktur ekonomi di kabupaten dan kota ini yang paling jelas terlihat. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2019 sebesar 81,09 persen PDRB Kabupaten badung dan 76,33 persen PDRB Kota Denpasar didominasi sektor tersier. Tingginya permintaan pariwisata akan meningkatkan permintaan sektor tersier, berkembangnya sektor tersier akan membantu dan memperbesar proses penyerapan tenaga kerja yang akan

berdampak pada pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Badung dibandingkan kabupaten/kota yang lain nilainya lebih tinggi, yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingginya kapasitas fiskal yang dimiliki karena pendapatan asli daerah Kabupaten Badung tinggi.

Dampak dari perubahan struktur ekonomi dan belanja pemerintah daerah ini terlihat dari capaian IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki nilai yang lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya di Bali. Peningkatan nilai IPM menandakan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karangasem yang memiliki nilai IPM yang paling rendah memiliki kapasitas fiskal yang paling sedikit karena sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk belanja rutin. Dengan PAD yang kecil dan proporsi belanja mengikat yang tinggi pemerintah kabupaten sulit untuk melakukan pembelanjaan barang publik untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan ketersediaan barang publik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan begitu akan meningkatkan pendapatan dan daya beli yang akan turut memberikan dampak pada proses peningkatan kesejahteraan.

METODOLOGI

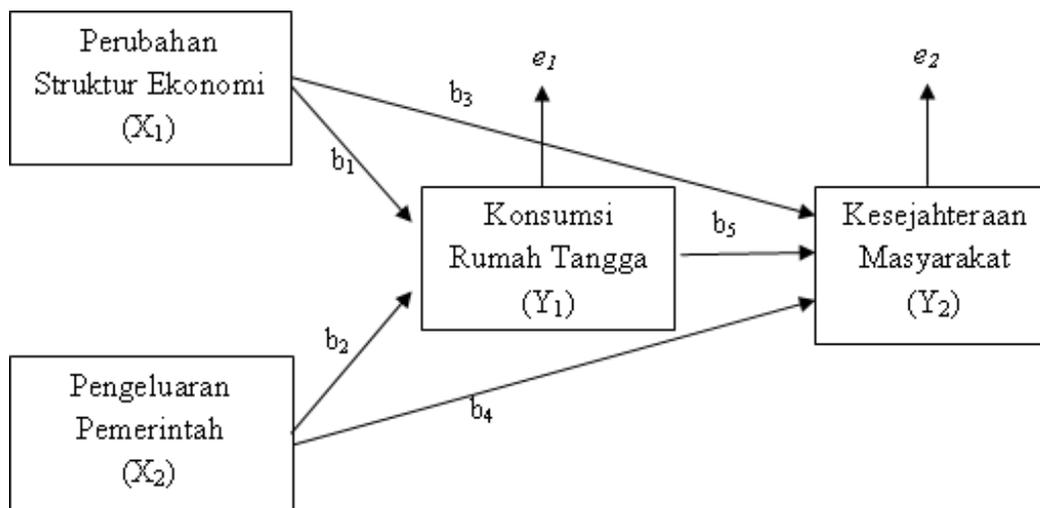
Penelitian ini digarap untuk menguji dan menjelaskan hubungan kausal antar variabel perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan pada sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali dipilih karena terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota yang dilihat dari nilai IPM masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, Provinsi Bali memiliki industri pariwisata sehingga permintaan pada sektor tersier sangat tinggi yang mendorong perubahan struktur ekonomi. Perbedaan PAD antar kabupaten/kota juga cukup nampak sehingga menimbulkan perbedaan pengeluaran daerah antarwilayah yang menyebabkan perbedaan pelayanan dan fasilitas publik.

Variabel perubahan struktur ekonomi sebagai variabel eksogen diukur dari persentase distribusi/kontribusi sektor tersier terhadap PDRB. Variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel eksogen merupakan total belanja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam realisasi

APBD. Variabel konsumsi rumah tangga sebagai variabel intervening dilihat dari pengeluaran rata-rata per kapita rumah tangga. Variabel kesejahteraan masyarakat sebagai variabel endogen diukur dengan nilai IPM. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu pada Kabupaten Tabanan, Jembrana, Badung, Klungkung, Gianyar, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar dengan data amatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yaitu terdiri dari 72 pengamatan. Data diperoleh dari sumber sekunder yaitu dari publikasi instansi/lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan instansi lain yang relevan.

Teknik analisis jalur dipergunakan dan di analisis menggunakan *software* SPSS . Analisis jalur dilakukan dengan meregresi persamaan jalur, kemudian dilakukan pengujian validitas model dengan melihat koefisien determinasi total, pengujian hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bersifat tidak langsung digunakan Uji Sobel. Taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%). Pola hubungan kausal antar variabel dalam bentuk gambar yang dikenal dengan diagram jalur akan sangat berguna untuk membantu mengkonseptualisasikan masalah atau hipotesis yang kompleks dan implikasi empirik dari teori yang diuji (Winarsunu, 2003).

Gambar 4. Diagram Jalur Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Kesejahteraan Masyarakat



Tabel 2: Klasifikasi Variabel dan Persamaan Jalur Penelitian

Model	Variabel Eksogen	Variabel Endogen	Persamaan
I	Perubahan Struktur Ekonomi (X ₁) dan Pengeluaran Pemerintah (X ₂)	Konsumsi Rumah Tangga (Y ₁)	$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1$
II	Perubahan Struktur Ekonomi (X ₁), Pengeluaran Pemerintah (X ₂) dan Konsumsi Rumah Tangga (Y ₁)	Kesejahteraan Masyarakat (Y ₂)	$Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2$

Rumus penghitungan koefisien determinasi total untuk menguji validitas model.

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 P_{e2}^2 P_{ep}^2 \dots \dots \dots (3)$$

$$P_{ei} = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (4)$$

Pengujian Hipotesis Pengaruh langsung

H0: $b_i \leq 0$ (perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat)

Hi: $b_i > 0$ (perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat)

Pengujian pengaruh tidak langsung

H0: konsumsi rumah tangga bukan sebagai variabel mediasi pengaruh perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat

Hi: konsumsi rumah tangga sebagai variabel mediasi pengaruh perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat)

Uji Sobel

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2} \dots \dots \dots (5)$$

$$Z = \frac{ab}{s_{ab}} \dots \dots \dots (6)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas model dilakukan dengan menghitung nilai koefisien determinasi total dan diperoleh nilai sebesar 0,962 yang berarti bahwa 96,2 persen variabel yang terkandung dapat dijelaskan oleh model dan 3,7 persen sisanya dipengaruhi variabel lain. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Perubahan struktur ekonomi memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsumsi secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian pengaruh tidak langsung dengan Uji Sobel diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga.

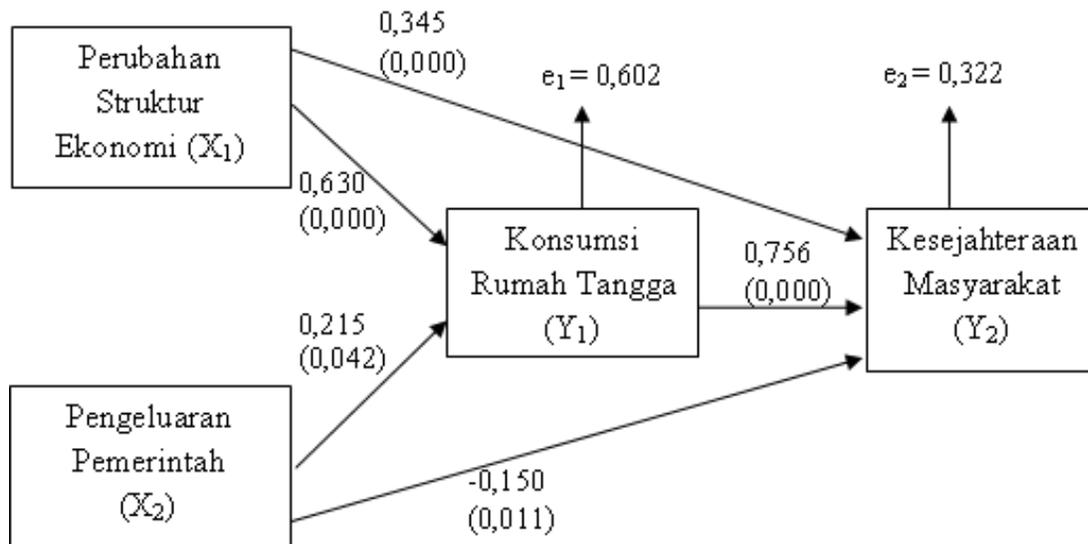
Tabel 3: Hasil Estimasi

Regresi	Koefisien Regresi Tidak Standar	Std. Error	Koefisien Regresi Standar	Sig.	t hitung	Keterangan
X1 -> Y1	28,050	4,614	0,630	0,000	6,079	Signifikan
X2 -> Y1	0,068	0,033	0,215	0,042	2,069	Signifikan
X1 -> Y2	0,223	0,045	0,345	0,000	4,982	Signifikan
X2 -> Y2	-0,001	0,000	-0,150	0,011	-2,612	Signifikan
Y1 -> Y2	0,011	0,001	0,756	0,000	11,651	Signifikan

Nilai R Square Model I : 0,637
 Nilai R Square Model II : 0,896
 Nilai Z hitung Model I : 5,38
 Nilai Z hitung Model II : 2,03

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2021

Gambar 2. Diagram Koefisien Jalur Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Kesejahteraan Masyarakat



Pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berubah struktur ekonomi maka akan terjadi peningkatan pada tingkat konsumsi rumah tangga. Adanya pengaruh positif perubahan struktur ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali menunjukkan bahwa proses pembangunan telah mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Struktur perekonomian di Provinsi Bali yang secara spesifik memiliki keunggulan pada industri pariwisata memberikan kontribusi besar pada perkembangan ekonomi masyarakat Bali. Perkembangan industri pariwisata di Provinsi Bali mendorong sektor lain yang menunjang industri pariwisata (sektor tersier) untuk tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan *output* perekonomian serta menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Keynes bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga

memiliki korelasi terhadap pendapatan rumah tangga. Secara general apabila terjadi peningkatan pendapatan maka akan diikuti oleh peningkatan konsumsi.

Demary et al., (2016) menemukan perubahan struktural berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain semakin baik suatu wilayah menangani perubahan struktur ekonomi maka semakin besar kemungkinan mengalami pertumbuhan *output* perkapita yang mengarah pada peningkatan kemakmuran. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Bayar & Morrow, (1999) dimana perubahan disisi penawaran yang meningkatkan potensi pertumbuhan bagi masyarakat meyebabkan harapan kepada konsumen untuk pendapatan jangka pajang yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang perubahan semacam itu akan menyebabkan dampak positif secara keseluruhan pada perilaku menabung masyarakat. Namun dalam jangka pendek kemungkinan besar akan meningkatkan konsumsi sebagai manfaat dari perubahan struktural.

Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga

Peningkatan pengeluaran pemerintah yang diukur dengan total belanja daerah memberikan dampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran pemerintah dapat dikaji dari sisi permintaan maupun penawaran yang akan berpengaruh pada *output* perekonomian yang akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Dari sisi permintaan pengeluaran pemerintah dapat dibentuk melalui persamaan Keynesian ($Y=C+I+G+(X-M)$). Belanja pemerintah akan langsung menentukan permintaan agregat, maka dengan semakin besarnya permintaan agregat maka *output* yang dihasilkan juga akan meningkat. Dari sisi penawaran pengeluaran pemerintah dapat dibentuk dari fungsi produksi klasik ($Y=F(A,K,L)$) disini peran pemerintah tidak secara eksplisit mempengaruhi *output*. Dalam kaitannya dengan teknologi (A) kontribusi pengeluaran pemerintah dapat dilakukan melalui litbang, dalam kaitannya dengan modal (K) pemerintah dapat berkontribusi melalui pembangunan barang publik atau infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekonomi, dalam kaitannya dengan tenaga kerja maka pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi melalui pendidikan pelatihan dan pelayanan kesehatan (Rochana, 2014).

Baik dari sisi permintaan maupun penawaran pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan *output* perekonomian. Peningkatan *output* berarti terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan pendapatan yang diikuti

peningkatan daya beli yang akan secara langsung memberikan pengaruh pada peningkatan konsumsi masyarakat. Semakin tinggi alokasi belanja pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas perekonomian maka akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung temuan Linnemann, (2006) dan Blanchard & Perotti, (2002) bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan konsumsi. Penelitian Sugiarto & Wibowo, (2020) juga mendapatkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga akhir.

Pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

Semakin berubah struktur ekonomi yang diukur dengan meningkatnya kontribusi sektor tersier, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pada Provinsi Bali dominasi sektor tersier tampak jelas di daerah Bali Bagian Selatan, rata-rata hampir 75 persen struktur perekonomian di dominasi sektor tersier. Data menunjukkan apabila suatu daerah memiliki kontribusi sektor tersier yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula capaian IPM yang diperoleh. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa pada periode perubahan struktur ekonomi akan mengubah distribusi pendapatan tenaga kerja di daerah perkotaan terhadap tenaga kerja di daerah pedesaan yang menyebabkan kesenjangan spasial. Menjadikan sektor tersier sebagai sektor basis tidak luput dari pengaruh tingginya permintaan pariwisata di Provinsi Bali. Apabila permintaan pariwisata berkurang akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Bali secara keseluruhan karena setiap sektor saling terkait satu sama lainnya ini mengakibatkan efek domino apabila krisis terjadi.

Perbedaan struktur ekonomi antar ruang dan waktu merupakan salah satu penyebab adanya kesenjangan antar kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis data struktur ekonomi dengan didominasi sektor tersier mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, tidak serta merta pembangunan ekonomi harus berfokus hanya pada sektor tersier karena berpotensi mengakibatkan kesenjangan sektoral. Selain itu perkembangan sektor-sektor non primer akan berdampak pada penggunaan lahan yaitu alih fungsi lahan pertanian yang akan menambah besar kesenjangan sektoral. Mekanisme ini dapat dijelaskan pada model

pembangunan Lewis dimana saat surplus tenaga kerja telah terserap habis ke industri modern, maka jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian di pedesaan akan berada pada kondisi efisien untuk memproduksi. Namun, saat ini pada kenyataannya sektor non primer akan terus berkembang karena semakin tingginya permintaan terhadap barang-barang non primer baik dari dalam maupun luar daerah/wilayah dan pada akhirnya akan terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan ekspansi sektor non primer.

Hasil ini mendukung penelitian Yasa, (2007) dan Sudrajat, (2019) yaitu perubahan struktur ekonomi berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional ke modern akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menandakan keberhasilan dalam pembangunan manusia melalui kondisi penduduk dengan pendapatan untuk hidup layak, penduduk yang berpendidikan serta sehat dan berumur panjang. Transisi ekonomi tradisional ke ekonomi maju adalah sebuah rangkaian perubahan dalam struktur ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian menunjukan secara langsung peningkatan pengeluaran pemerintah tidak memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur pengaruh langsung yang bernilai negatif berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendanaan pengeluaran pemerintah sebagian besar bersumber dari pajak. Penaan pajak akan mengurangi *output* dan pendapatan yang diterima pelaku usaha maupun perseorangan. Blanchard & Perotti., (2002) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap *output*. Semakin tinggi penerimaan pemerintah suatu wilayah akan semakin tinggi pula pengeluarannya. Dalam ekonomi sektor publik peran pemerintah penting yaitu untuk menyediakan barang publik dan mengatasi kegagalan pasar. Dalam hal ini peran pemerintah sangat strategis untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat apabila fungsi pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk menjalankan fungsi pemerintah terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang kemungkinan menimbulkan inefisiensi, dimana di tahun 2019 rata-rata sekitar 38 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai dan rata-rata sekitar 27 persen anggaran digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jadi rata-rata hampir 70 persen APBD digunakan untuk kepentingan aparatur Pemda sementara sebagian kecil sisanya untuk kepentingan masyarakat umum.

Erstelita, (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai berpengaruh pada penurunan kemandirian keuangan daerah. Deswanto & Ismail, (2017) menemukan bahwa belanja barang dan jasa memberikan dampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pengenaan pajak yang mengurangi kemakmuran masyarakat tidak dibarengi dengan perolehan manfaat dari program pembangunan daerah. Jika komposisi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terlalu membebani anggaran dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memperlebar ruang fiskal yang dimiliki.

Apabila pemerintah daerah mengurangi belanja konsumsi (*current expenditure*) untuk menambah belanja untuk keperluan belanja infrastruktur ekonomi (*capital expenditure*) maka dalam jangka panjang pergeseran pada komposisi belanja pemerintah tersebut memiliki implikasi positif dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Khususnya pada awal peningkatan dimana belanja pada persediaan modal publik yang dibiayai oleh pengurangan dalam konsumsi pemerintah (*current expenditure*) cenderung mengurangi kesejahteraan, karena penambahan sementara dari belanja modal yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi pemerintah (*current expenditure*). Jika kebijakan pergeseran dilakukan secara permanen konsumsi pemerintah cenderung akan meningkat, asalkan belanja fasilitas publik tidak terlalu rendah dan yang terpenting belanja untuk konsumsi pemerintah (*current expenditure*) tidak terlalu tinggi (Ganelli & Tervala, 2007). Daripada mengurangi belanja konsumsi, secara eksplisit fokus pemerintah daerah sebaiknya pada strategi peningkatan PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal yaitu dengan mengelola aset pemerintah daerah secara baik sehingga mendatangkan keuntungan, susunan dan pelaksanaan anggaran harus mengadakan surplus anggaran, melakukan restrukturisasi aset yang hanya menjadi beban anggaran, meningkatkan keuntungan perusahaan daerah, perbaikan masalah lingkungan dan sanitasi, antisipasi masalah eksternalitas, koordinasi yang baik antar instansi dalam pengalokasian anggaran dan dalam hal pelayanan publik penyusunan anggaran sebaiknya menekankan pada pendidikan, transportasi, kesejahteraan, keamanan publik dan sanitasi (Purbadharmaja, 2007).

Pengaruh langsung konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat

Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tingkat konsumsi merupakan gambaran dari pendapatan yang diperoleh individu. Apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi juga akan mengalami peningkatan, dimana dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi, meningkatnya konsumsi berarti kapabilitas masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi juga semakin tinggi, peningkatan kapabilitas masyarakat ini merupakan tanda dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu instrumen dalam permintaan agregat yang mempengaruhi *output* nasional, semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga akan memberikan dampak pada peningkatan *output* agregat. Peningkatan output akan berimbas pada peningkatan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan menambah kembali tingkat kesejahteraan sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung temuan Deden, (2018) bahwa peningkatan konsumsi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yudanto & Priyagus, (2020) juga menemukan bahwa konsumsi non makanan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendukung teori sebelumnya bahwa semakin tinggi konsumsi non makanan mengindikasikan kesejahteraan yang semakin tinggi.

Pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga

Proses ini terjadi akibat pergeseran *share* pada struktur ekonomi yang lebih produktif yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi terhadap sektor yang kurang produktif dengan nilai tambah rendah. Pergeseran ini akan memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga produktivitas akan meningkat yang diikuti peningkatan pendapatan. Apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan konsumsi, semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Daerah yang relatif lebih maju pada umumnya memiliki struktur ekonomi yang mengalami perubahan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan konsumsi masyarakat yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Percepatan dalam perubahan struktural merupakan suatu syarat apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi modern (Todaro, 2000). Diperlukan untuk menempuh kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kaum produktif yang merupakan faktor yang sangat esensial dalam perubahan struktural dan juga kunci untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan struktural adalah segalanya tentang meningkatkan produktivitas dan perpindahan sumber daya dari sektor tertinggal ke yang lebih efisien. Maka dari itu, ini harus menjadi pusat dari perencanaan pembangunan (Naiya, 2014).

Struktur ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi kinerja perekonomian, sehingga perbedaan struktur ekonomi antar ruang dan waktu dapat menjelaskan mengenai perbedaan dari pembangunan ekonomi (Constantine, 2017). Kuznets, (1995) berpendapat bahwa kesenjangan ekonomi merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi. Artana & Arka, (2015) menemukan dimana pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap peningkatan disparitas ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi salah satunya merupakan hasil dari perubahan struktur ekonomi. Kuznet mengasumsikan bahwa keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi pada akhirnya mengarah pada turunnya kesenjangan ekonomi. Namun Piketty menemukan hal yang berbeda mengenai korelasi antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi. Piketty, (2014) menemukan hal sebaliknya bahwa pada *high income stage* yang terjadi adalah peningkatan kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik, nilai Gini Rasio dan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Bali dalam tiga dekade ini menunjukkan peningkatan meskipun perlahan. Se jauh ini bukti empiris yang paling relevan untuk permasalahan ini yaitu hasil temuan Piketty. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikur dengan IPM merupakan akibat dari perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pertumbuhan. Piketty khawatir bahwa kesenjangan pendapatan akan meningkatkan pengaruh kelompok kaya yang mungkin menggunakan pengaruhnya untuk mengubah institusi politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok kaya. Maka untuk menghindari hal tersebut Piketty menyarankan pemerintah menentukan langkah-langkah fiskal untuk menekan agar kesenjangan tidak kian meningkat.

Pada Provinsi Bali penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor tersier. Seiring berjalannya waktu penawaran tenaga kerja di sektor primer akan berkurang. Akibat dari upah tenaga kerja pada sektor tersier yang cenderung lebih tinggi dan konsisten mengakibatkan sektor primer kurang diminati, program pendidikan dan pelatihan akan lebih mengarah pada persiapan tenaga kerja agar dapat terserap ke sektor tersier. Dalam jangka panjang hal tersebut akan mengakibatkan kesenjangan sektoral dan alih fungsi lahan di sektor pertanian yang dapat mengancam stabilitas perekonomian daerah. Solusi untuk dampak jangka panjang ini harus diperhatikan yaitu dengan cara membuat sektor primer lebih menarik dan *profitable*.

Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi *output* baik dari sisi permintaan maupun penawaran agregat. Apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka *output* agregat juga akan meningkat dan akan mengakibatkan peningkatan pendapatan seluruh pelaku ekonomi yang diikuti terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga. Melalui peningkatan pendapatan dan kegiatan konsumsi seseorang dapat meningkatkan kepuasan dan kesenangannya.

Sesuai pandangan *classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach* kesejahteraan individu bergantung pada seberapa besar tingkat kesenangan dan kepuasan yang dapat diraih dalam kehidupan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Arifin, (2017) menemukan bahwa ada pengaruh antara belanja pemerintah jika dipakai untuk pendidikan dan belanja kesehatan akan memberikan efek pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang lebih menyoar kepentingan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan perubahan di segala bidang seperti ekonomi pendidikan dan kesehatan serta perubahan-perubahan kebijakan pada berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Penelitian

Perubahan struktur ekonomi memberikan dampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi mengakibatkan peningkatan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan atau konsumsi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak secara otomatis dapat mengurangi kesenjangan pembangunan. Peningkatan kinerja ekonomi yang terkonsentrasi pada daerah tertentu menyebabkan ketimpangan spasial. Perubahan struktur ekonomi juga menyebabkan ketimpangan sektoral yang pada akhirnya mengurangi lahan, tenaga kerja di bidang pertanian yang mengancam stabilitas ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila pengeluaran pemerintah yang terlalu terbebani belanja mengikat maka tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila pengeluaran pemerintah dimaksimalkan untuk akselerasi proses peningkatan kegiatan ekonomi melalui belanja publik yang akan mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat akan lebih berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar porsi belanja publik meningkat maka pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan asli daerahnya masing-masing.

SIMPULAN DAN SARAN

Perubahan struktural dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mendorong peningkatan *output* perekonomian. Perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Peningkatan produktivitas menyebabkan *output* yang dihasilkan akan meningkat, begitu pula dengan penegeluaran pemerintah, dimana pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan permintaan agregat, saat pengeluaran pemerintah meningkat maka *output* juga akan meningkat. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, peningkatan pendapatan akan mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh hasil pembangunan seperti dalam memperoleh pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan yang layak, serta untuk konsumsi barang sekunder maupun tersier. Ini berarti peningkatan kualitas konsumsi masyarakat yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi sektor tersier dan penurunan kontribusi sektor primer terhadap PDRB berpengaruh langsung terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Perubahan struktur ekonomi merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan kinerja ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat melalui peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga. Peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran pemerintah jika dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan kinerja perekonomian, peningkatan kinerja perekonomian dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konsumsi rumah masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi dengan indikator peningkatan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB, berpengaruh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan IPM sebagai indikatornya. Hasil analisis menunjukkan, apabila struktur ekonomi suatu wilayah mengarah ke struktur dengan sektor tersier yang lebih dominan maka semakin tinggi capaian IPM wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan karena sektor tersier memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan menguntungkan jika dikaitkan dengan potensi-potensi ekonomi di Provinsi Bali.

Peningkatan pengeluaran pemerintah tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat inefisiensi pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah, sehingga dana yang dikeluarkan tidak secara langsung dapat menyentuh pada kepentingan masyarakat umum. Belanja pemerintah yang terlalu terbebani belanja yang bersifat mengikat dapat mengurangi porsi belanja untuk kepentingan publik. Maka diperlukan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih lebar dengan meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing.

Konsumsi rumah tangga secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga merupakan tanda bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang merupakan dampak dari proses pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan maka dalam jangka pendek konsumsi juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi berarti peningkatan kapabilitas masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan. Semakin besar tingkat konsumsi rumah tangga menandakan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Konsumsi rumah tangga memediasi secara parsial perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila struktur ekonomi berubah mengarah ke sektor tersier maka akan berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan struktur ekonomi dapat menjelaskan mengenai perbedaan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah adalah dampak dari perbedaan struktur ekonomi dan pertumbuhan.

Pada Provinsi Bali akibat perkembangan industri pariwisata sektor tersier memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada sektor lain. Sektor lain dianggap kurang menguntungkan sehingga perlahan mulai ditinggalkan. Dalam jangka panjang, fenomena ini akan mengarah pada ketimpangan sektoral. Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memediasi penuh pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk kepentingan publik sehingga dapat

meningkatkan kinerja ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perubahan struktur ekonomi merupakan penyebab sekaligus konsekuensi bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada suatu wilayah saja menyebabkan kesenjangan antarwilayah, maka saran yang dapat diberikan yaitu tiap-tiap daerah harus mampu mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing. Hal mendasar untuk mengurangi dampak akibat perubahan struktural terletak pada pemberdayaan manusia agar lebih produktif dan adaptif, untuk mencapai hal tersebut kesetaraan peluang di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penting untuk diperhatikan.

Selama ini investasi dan pembangunan cenderung di wilayah Bali Selatan maka penting melakukan redistribusi ke wilayah lain untuk mempercepat proses pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan sektor lain juga harus diperhatikan yaitu dengan membangun sektor pertanian dengan memfasilitasi penelitian menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas sektor ini agar tidak terjadi ketimpangan sektoral, sehingga perekonomian lebih stabil jika terjadi guncangan eksternal serta mengurangi alih fungsi lahan.

Perbedaan penerimaan anggaran daerah mengakibatkan perbedaan pengeluaran pemerintah antar kabupaten/kota, konsekuensi dari hal ini adalah kesenjangan ekonomi antar wilayah. Upaya untuk mengurangi kesenjangan akibat perbedaan penerimaan dan pengeluaran ini maka diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada daerah yang kurang maju, sehingga dapat meningkatkan ruang fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketimpangan PAD antarwilayah dan juga dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu alokasi anggaran sebaiknya lebih dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ekonomi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan konsumsi serta kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Aditia, N., & Dewi, N. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), 212–242.

- Aizenman, J., Lee, M., & Park, D. (2012). The Relationship between Structural Change and Inequality: A Conceptual Overview with Special Reference to Developing Asia. *SSRN Electronic Journal*, 10.2139/ss.
- Anderson, E., D'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2017). Does Government Spending Affect Income Inequality? A Meta-Regression Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 961–87.
- Anderson, K., & Pangestu, M. (1998).). Structural Changes in a Reforming World Economy: Implications for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34(3), 85–113.
- Arifin, B. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi pada kabupaten/kota di propinsi Kalimantan selatan)*. Universitas Terbuka.
- Artana Yasa, I., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/doi:10.24843/JEKT.2015.v08.i01.p07>
- Bayar A., & Morrow, K. M. (1999). *European Economy*.
- Baymul, C., & Sen, K. (2020). Was Kuznets Right? New Evidence on the Relationship between Structural Transformation and Inequality. *The Journal of Development Studies*, 56(9), 1643–1662.
- Blanchard., O., & Perotti., R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. *The Quarterly Journal of Economics*. *Oxford University Press*, 117(4), 1329–1368.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Cheong, T. ., & Wu, Y. (2014). *The Impacts of Structural Transformation an Industrial Upgrading on Regional Inequality in China*. 13, 339–350.
- Constantine, C. (2017). Economic Structure, Institutions and Economic Performance. *Journal Of Economic Structure*, 6(2), 1–18.
- Deden. (2018). Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Konsumsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Edueco*, 1, 50–63.
- Demary, V., Grömling, M., Kolev, G., & Matthes, J. (2016). *Prosperity in a changing world: Structural change and economic growth* (No. 6).
- Deswanto, D. B., & Ismail, A. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187–210.

- Dietrich, A. (2012). Does growth cause structural change, or is it the other way around? A dynamic panel data analysis for seven OECD countries. *Empir. Econ*, 43(3), 915–944.
- Doumbia, D., & Kinda, T. (2019). *Reallocating Public Spending to Reduce Income Inequality: Can It Work?* (19/188).
- Ercolani, M., & Wei, Z. (2014). *n Empirical Analysis of China's Dualistic Economic Development: 1965–2009* (No. 10).
- Erstelita, T. R. D. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Fattah, S., & Aspa, M. (2012). Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia. *Journal Of Humanities And Social Science (JHSS)*, 5(6), 40–50.
- Ganelli, G., & Tervala, J. (2007). *Public Infrastructures, Public Consumption, and Welfare in a New-Open-Economy-Macro Model* (07/67).
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1).
- Hukom, A. (2015). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129.
- Jackson, T., & Marks, N. (1999). Consumption, Sustainable welfare and Human Needs: With Reference to UK Expenditure Patterns Between 1954 and 1994. *Ecological Economics*, 28, 421–441.
- Kaniovski, S., & Peneder, M. (2002). On The Structural Dimension Of Competitive Strategy. *Industrial and Corporate Change*, 11(3), 257–279.
- Krisianto, A. (2018). Dampak Elektrifikasi Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Kepulauan Seribu, Jakarta. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 164–173. <https://doi.org/doi:10.24843/JEKT.2018.v11.i02.p02>
- Kuznets, S. (1995). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Linnemann, L. (2006). The Effect of Government Spending on Private Consumption: A Puzzle? *Journal of Money, Credit and Banking*, 38(7), 1715–1735.
- Naiya, I. I. (2014). *Structural Change, Economic Growth and Poverty in OIC countries: the case of Indonesia, Malaysia, Nigeria and Turkey* (No. 53954; MPRA Paper).
- Nyoman, S., & Murjana Yasa, I. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/doi:10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p10>
- Piketty, T. (2014). *Capital In The 21st Century*. MA: Harvard University Press.

- Purbadharmaja, I. B. P. (2007). Kajian Terhadap Fungsi Anggaran Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Buletin Studi Ekonomi*, 3(3).
- Rochana, S. H. (2014). *Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*.
- Skoufias, E., Katayama, R. S., & Essama-Nssah, B. (2012). Too little too late: welfare impacts of rainfall shocks in rural Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(3), 351–368.
- Sudrajat, J. (2019). Economic Structure and Welfare Indicator Changes in West Kalimantan after Oil Palm Expansion. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 87–96.
- Sugiarto, S., & Wibowo, W. (2020). Determinants of Regional Household Final Consumption Expenditure in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 13(2).
- Sutomo, S. (1989). Income, Food Consumption and Estimation of Energy and Protein Intake of Households: A Study Based on the 1975 and 1980 Indonesian Social Accounting Matrices. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 25(3), 57–72.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*.
- Vu, K. M. (2017). *Structural Change and Economic Growth: Emperical Evidence and Policy Insights From Asian Economies* (Struktural Change and Economic Dynamics 41).
- Winarsunu, T. (2003). *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, Malang*.
- Yasa, I. N. M. (2007). *Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. Universitas Airlangga.
- Yudanto, D, R. ., & Priyagus. (2020). pengaruh pendapatan perkapita dan inflasi serta suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2).
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Economics and Bussines*, (1)1, 180–196.